

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM
PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL)
DIPASAR RAYA KOTA SOLOK**

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Tim Penguji Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Program Studi Ilmu Administrasi Negara sebagai salah satu persyaratan
Guna memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik*



OLEH :

**AGIA TRI REGINA SHANDY
55078/2010**

**PROGRAM STUDI
ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2014**

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Penertiban Pedagang
Kaki Lima (PKL) di Pasar Raya Kota Solok

Nama : Agia Tri Regina Sandhy

TM/NIM : 2010/55078

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Jurusan : Ilmu Sosial Politik

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 05 Mei 2014

Disetujui Oleh

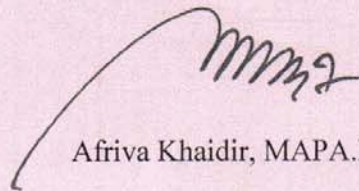
Pembimbing I



Drs. Syamsir, M.Si. Ph.D

NIP. 19630401 198903 1 003

Pembimbing II



Afriva Khaidir, MAPA.Ph.D

NIP: 19660411 199003 1 002

PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang

Pada Hari Senin, 05 Mei 2014 pukul 09.00 WIB s/d 11.00 WIB

**Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Penertiban
Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Raya Kota Solok**

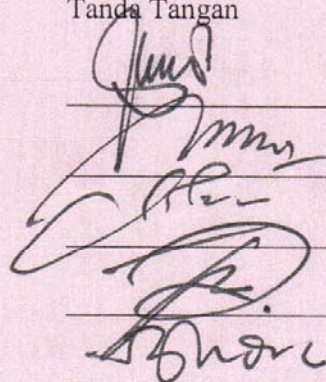
Nama : Agia Tri Regina Sandhy
TM/NIM : 2010/55078
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Jurusan : Ilmu Sosial Politik

Padang, 05 Mei 2014

Tim Penguji:

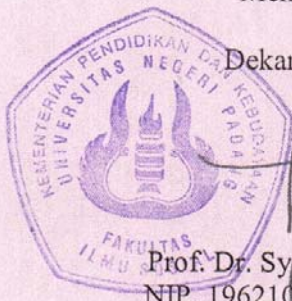
	Nama
Ketua	: Drs. Syamsir, M.Si. Ph.D
Sekretaris	: Afriva Khaidir MAPA. Ph.D
Anggota	: Drs. Yasril Yunus, M.Si
Anggota	: Zikri Alhadi. S.IP, MA
Anggota	: Adil Mubarak, S.IP, M.Si

Tanda Tangan



Mengesahkan

Dekan FIS UNP



Prof. Dr. Syafri Anwar M.Pd
NIP. 19621001 198903 1 002

ABSTRAK

Agia Tri Regina Sandhy 55078/2010 : Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Raya Kota Solok

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya beberapa masalah dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Penertiban PKL di Pasar Raya Kota Solok yang menjadikannya tidak optimal dilaksanakan. Hal ini terlihat masih banyaknya PKL yang mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang pergi kepasar, kurangnya kesadaran PKL dalam mematuhi Perda dan kebijakan Pemerintah Kota Solok. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan dalam penertiban PKL di Pasar Raya Kota Solok, kendala-kendala yang dihadapi dalam penertiban PKL di Pasar Raya Kota Solok, dan upaya apa yang dilakukan Pemerintah dalam penertiban PKL di Pasar Raya Kota Solok.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Informan penelitian diambil secara *Purposive Sampling*. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data dan menggunakan teknik triangulasi sumber. Kemudian data dianalisis melalui tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang dilakukan selama proses penelitian berlangsung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Pemerintah dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Raya Kota Solok di implementasikan melalui tahap sosialisasi, penyuluhan dan tindakan persuasif dan *follow up* (pengawasan). Namun penertiban PKL selama ini terkesan melaksanakan dengan cara *follow up* ketimbang sosialisasi, penyuluhan dan tindakan persuasif. Pelaksanaan kebijakan tersebut belum optimal dilakukan ini disebabkan karena penertiban dilakukan hanya sebatas rencana tanpa realisasi yang jelas. Dalam pelaksanaannya kebijakan tersebut masih banyak menemui permasalahan-permasalahan antara lain: kerjasama dan koordinasi yang masih menghadapi kendala, anggaran yang belum memadai, kurangnya aparaturnya dalam menertibkan PKL, kurangnya kesadaran PKL terhadap kebijakan dan tidak adanya solusi yang dapat diterima PKL dalam melakukan penertiban. Untuk keberhasilan implementasi kebijakan ini. Sebaiknya Pemerintah Kota Solok memberikan alternatif lokasi yang tepat kepada PKL.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikumWr. Wb

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan Semesta Alam yang menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Shalawat serta salam senantiasa penulis ucapkan kepada suri tauladan kita dan manusia termulia Muhammad SAW beserta keluarga dan parasahabat beliau. Alhamdulillah dengan rahmat dan ridho dari Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Raya Kota Solok”**. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Sarjana Strata 1 (S1) dengan gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, tidak terlepas dari bimbingan, saran dan motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Drs. Syamsir, M.Si. Ph.D selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Afriva Khaidir,SH.M.Hum.MAPA.Ph.D selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan, arahan dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Drs. Yasril Yunus, M.Si, Bapak Zikri Alhadi, S.IP.MA, dan Bapak Adil Mubarak, S.IP.M.Si selaku Tim Penguji yang telah memberikan

banyak kritik dan saran yang membangun kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak Prof. Dr. Phil Yanuar Kiram sebagai Rektor Universitas Negeri Padang.
5. Bapak Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
6. Bapak Drs. M. Fachri Adnan, M.Si. Ph.D Ketua Jurusan Ilmu Sosial Politik Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang.
7. Bapak Drs. Karjuni Dt. Maani, M.Si Dosen Pembimbing Akademik selama penulis mengikuti perkuliahan di Universitas Negeri Padang.
8. Bapak Sukardi.SH selaku Kepala Dinas Pengelolaan Pasar, Bapak Rusman.SH selaku Kasi Penertiban dan Kebersihan, Bapak Alex Shindro selaku Koordinator Iner dan Bapak Yuli Hendri.SH selaku Bendahara Penerima Dinas Pengelolaan Pasar Raya yang telah meluangkan waktu dan bersedia untuk diwawancarai.
9. Bapak Drs. Asril M.M selaku Kepala Satpol PP, Ibu Tati Patrisia selaku Kasi Perlindungan Masyarakat, dan Bapak Jamalus selaku Komandan Provos Kantor Satpol PP Kota Solok yang telah meluangkan waktu dan bersedia untuk diwawancarai.
10. Pihak Pedagang kaki lima (PKL) di Pasar Raya dan masyarakat Kota Solok yang telah bersedia memberikan informasi mengenai penelitian ini.

11. Teristimewa untuk orang tuaku serta kakak-kakakku yang telah memberikan do'a khususnya, dorongan untuk semangat dan motivasi kepada penulis secara moral maupun material agar dapat menyelesaikan skripsi ini.

12. Teman-teman seperjuangan terutama bagi rekan-rekan Jurusan Ilmu Sosial Politik Universitas Negeri Padang angkatan 2010 yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis sangat menyadari meskipun telah berusaha semaksimal mungkin dalam menyempurnakan skripsi ini, namun masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan, masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dari berbagai pihak untuk menyempurnakan Ilmu Pengetahuan yang penulis miliki. Meski begitu, penulis tetap berharap bahwa karya ini bisa menjadi banyak manfaat bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikumWr. Wb

Padang, Maret 2014

Penulis

Agia Tri Regina Sandhy

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL

LEMBARAN PENGESAHAN

LEMBARAN TIDAK PLAGIAT

LEMBARAN PERSEMBAHAN

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi, Pembatasan,dan Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Konsep Teoritis.....	10
1. Konsep Kebijakan.....	10
2. Konsep Implementasi.....	17
3. Pendekatan Implementasi Kebijakan Publik Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Solok.....	23
B. Kerangka Konseptual.....	26

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	28
B. Lokasi Penelitian.....	29
C. Informan Penelitian.....	29
D. Jenis, Teknik dan AlatPengumpulan Data.....	30
E. Uji Keabsahan Data.....	32
F. Teknik Analisis Data	33

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum Objek Penelitian.....	35
B. Temuan Khusus Penelitian.....	45
C. Pembahasan.....	83

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	90
B. Saran.....	91

DAFTAR PUSTAKA.....	x
----------------------------	----------

LAMPIRAN.....	xii
----------------------	------------

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Komposisi Pedagang Kaki Lima (PKL)	
Menurut Jenis Dagangan.....	5
Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	30
Tabel 4.1 Jumlah Kecamatan dan Kelurahan Kota Solok.....	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....	27
Gambar 4.1 Struktur Dinas Pengelolaan Pasar.....	42
Gambar 4.2 Surat Pemberitahuan kepada PKL Sewaktu Sosialisasi.....	48
Gambar 4.3 Surat Undangan Rapat kepada PKL.....	49
Gambar 4.4 Hasil Rapat yang dilakukan dengan PKL.....	50
Gambar 4.5 Pintu Masuk Pasar Raya Kota Solok.....	52
Gambar 4.6 PKL yang berjualan di gang-gang.....	54
Gambar 4.7 Lahan Pakir dipergunakan oleh PKL Berdagang.....	59
Gambar 4.8 PKL Ikan dan Sayur yang belum Jadwal Berdagang...	62
Gambar 4.9 Keberadaan Tukang Ojek didalam Pasar.....	79
Gambar 4.10 PKL ayam dan ikan yang Berjualan Diatas.....	82

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Pedoman Wawancara.....	93
Lampiran 2: Dokumentasi Penelitian.....	96

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan publik adalah segala hal yang diputuskan oleh pemerintah. Definisi ini menunjukkan bagaimana pemerintah memiliki otoritas untuk membuat kebijakan yang bersifat mengikat. Dalam proses pembuatan kebijakan terdapat dua model pembuatan, yang bersifat top-down dan bottom-up. Idealnya proses pembuatan kebijakan hasil dari dialog antara masyarakat dengan pemerintah, sehingga kebijakan tidak bersifat satu arah.

Masalah kebijakan merupakan sebuah fenomena yang memang harus ada mengingat tidak semua kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Tak jarang kebijakan dari pemerintah itu justru menimbulkan masalah baru di dalam masyarakat. Kenyataan ini dapat dilihat dari bagaimana pemerintah dalam memberdayakan para Pedagang Kaki Lima (PKL). Kebijakan tatanan kota yang merujuk pada ketertiban dan keindahan kota menjadikan sebuah harga mahal bagi kehadiran para Pedagang Kaki Lima (PKL).

Untuk mendefinisikan tentang masalah kebijakan kita harus merujuk pada definisi dari kebijakan publik itu sendiri seperti yang telah dijelaskan diatas. Masalah kebijakan merupakan sebuah kesenjangan dari implementasi sebuah kebijakan di dalam masyarakat. Terjadinya ketidakserasian antara isi dari kebijakan terhadap apa yang terjadi dilapangan merupakan masalah dari kebijakan tersebut.

Fenomena Pedagang Kaki Lima (PKL) telah banyak menyita perhatian pemerintah. Karena PKL sering kali dianggap mengganggu ketertiban lalu lintas, jalanan menjadi tercemar, menimbulkan kerawanan sosial dan tata ruang kota yang kacau. Masalah keberadaan pedagang kaki lima terutama di kota-kota besar menjadi warna tersendiri serta menjadikan pekerjaan rumah bagi pemerintah kota. Pedagang kaki lima atau PKL adalah merupakan pihak yang paling merasakan dampak dari berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terutama kebijakan tentang ketertiban dan keindahan kota.

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan kelompok tenaga kerja yang banyak di sektor informal. PKL juga memiliki potensi untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja, terutama bagi tenaga kerja yang kurang memiliki kemampuan dan keahlian yang memadai untuk bekerja di sektor formal karena rendahnya tingkat pendidikan yang mereka miliki. PKL sebagai tulang punggung ekonomi masyarakat lemah, membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah dalam hal penyelenggaraan iklim yang kondusif bagi berkembangnya usaha mereka.

Penyelenggaraan iklim yang kondusif bagi berkembangnya mereka akan mengefektifkan pengelolaan dan penataan PKL agar meningkat dan berkembang skala usahanya tanpa mengabaikan ketertiban, kebersihan dan keindahan kotadan ketentraman masyarakat. Selain itu PKL juga sebagai bagian dari masyarakat pelaku usaha memiliki potensi besar untuk dikembangkan dan diberdayakan. Maka dari itu, perlu adanya pemahaman lebih menyeluruh mengenai kebijakan penataan PKL. Masalah Pedagang Kaki Lima (PLK) tidak kunjung selesai di

setiap daerah di Indonesia, permasalahan ini muncul setiap tahun dan terus saja berlangsung tanpa ada solusi yang tepat dalam pelaksanaannya.

Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Solok mempunyai dua tipe yaitu: a) Legal, yang dimaksud PKL legal yaitu mereka yang berada dikawasan pasar yang membayar iuran setiap hari, sedangkan b) Ilegal PKL yang menempati ruang publik dan tidak membayar iuran yang berada diluar kawasan pasar kepada Dinas Pengelolaan Pasar dan tidak sesuai dengan Visi Kota Solok yang sebagian besar menekankan aspek kebersihan, keindahan, dan kerapian kota atau kita kenal dengan istilah (3K).

Dinas Pengelolaan Pasar menggunakan kebijakan dalam menertibkan PKL antara lain dengan: a) mekanisme sosialisasi, penyuluhan dan pendekatan perorangan (tindakan persuasif) dan b) mekanisme *follow up* yaitu pengawasan terhadap PKL. Karena itu Pedagang Kaki Lima (PKL) sering kali menjadi target utama kebijakan-kebijakan pemerintah seperti penggusuran dan relokasi. (Sumber: Yuli Hendri.SH Dinas Pengelolaan Pasar).

Dampak yang paling signifikan yang dirasakan oleh PKL adalah seringnya PKL menjadi korban penggusuran oleh para Satpol PP serta banyaknya kerugian yang dialami oleh PKL tersebut, baik kerugian materil maupun kerugian non materil. Hal ini merupakan masalah yang sangat kompleks karena akan menghadapi dua sisi dilematis. Pertentangan antara kepentingan hidup dan kepentingan umum akan berbenturan kuat dan menimbulkan friksi diantara keduanya.

Para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang umumnya tidak memiliki keahlian khusus yang mengharuskan mereka bertahan dalam suatu kondisi yang memperhatikan, dengan begitu banyaknya kendala yang harus dihadapi, diantaranya kekurangan modal, tempat berjualan yang tidak menentu, kemudian ditambah dengan berbagai aturan seperti adanya Perda Kota Solok yang melarang keberadaan mereka yaitu No 3 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pasar yaitu:

“Berdasarkan hasil pendataan dan penetapan prioritas sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (4) Peraturan Daerah ini akan dilakukan penelitian, seleksi dan penetapan atau penunjukan usaha kecil atau informal atau pedagang kaki lima yang berhak menempati ruang tempatusaha yang disediakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan”.

Melihat kondisi seperti ini, maka seharusnya semua tindakan pemerintah didasarkan atas kepentingan masyarakat atau ditunjukan untuk kesejahteraan rakyat. Mengingat begitu pentingnya untuk mengetahui kebijakan-kebijakan pemerintah dalam menangani masalah Pedagang Kaki Lima (PKL).

Sesuai dengan kebijakan dan fungsi utama Kota Solok yang mengarah kepada visi dan misi Kota Solok dimana salah satu untuk mencapai visi kota yaitu mendorong dan memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya perekonomian masyarakat Kota Solok melalui:

- a. Menjadikan Kota Solok sebagai pusat perdagangan untuk Provinsi Sumatera Barat bahagian selatan dari perdagangan lokal, untuk itu perlu ditunjang dengan sistem perdagangan yang mampu menjalankan fungsi perdagangan besar dan sebagai pasar induk.

- b. Mengembangkan fungsi perdagangan besar dan pembinaan pengusaha menengah dan kecil melalui pembinaan manajemen.
- c. Menjadikan koperasi dan usaha kecil dan menengah sebagai badan usaha yang mandiri dan mempunyai daya saing yang tinggi sehingga secara bertahap berperan sebagai pilar perekonomian daerah.
- d. Meningkatkan kinerja usaha dan peran koperasi atau PKL dengan menyediakan tempat berkonsultasi. (Sumber: Buku Profil Pasar Raya Solok Tahun 2010).

Tabel 1.1 Komposisi Pedagang Kaki Lima (PKL) Menurut Jenis Dagangannya

No	Jenis Dagang	Jumlah
1.	Pakaian Jadi	154
2.	Kaset	57
3.	Makanan dan Minuman	68
4.	Radio	38
5.	Tas, Dompot dan Topi	72
6.	Pecah Belah	6
7.	Bunga	28
8.	Aksesoris	53
9.	Mainan Anak	58
10.	Buah-Buahan	54
11.	Pisau	17
12.	Ayam Bumbu	13
13.	Sayur	112
14.	Ikan Laut dan Ikan Tawar	57

(Sumber: Buku Profil Pasar Raya Solok Tahun 2010).

Berdasarkan hasil observasi awal penulis lakukan dan hasil wawancara dengan salah seorang Pedagang Kaki Lima (PKL) yang bernama ibu Ernawati yang berjualan buah-buahan. Tidak adanya perhatian dari Pemerintah Daerah Kota Solok terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) pada saat sekarang ini, dan masih banyak PKL yang tidak mempunyai tempat berjualan di pasar,

dibandingkan pada zaman Pemerintah Kota Solok yang lama, dan kenyataan yang penulis temukan pada saat sekarang ini kesemrawutan Pasar Raya Solok oleh banyaknya PKL yang berjualan semakin hari semakin bertambah karena lahan pasar yang tidak dapat menampung PKL yang begitu banyak.

Mulai dari jalan didepan Taman Kota hingga keluar di Berok, pada pagi dan sore hari banyak PKL yang berjualan, bagi pengguna kendaraan bermotor merasakan kemacetan pada sore hari karena separuh jalan dipergunakan untuk berdagang. Begitu juga lahan parkir pun dipenuhi oleh Pedagang Kaki Lima (PKL), termasuk dengan jalan dan gang dalam Pasar Raya, untuk jalan naik kelantai atas juga sudah di isi oleh Pedagang Kaki Lima (PKL), sehingga hak pejalan kaki dan kenyamanan masyarakat yang berkunjung kepasar raya terganggu dengan adanya Pedagang Kaki Lima (PKL).

Terlihat tidak adanya campur tangan Pemerintah dalam mengatur Pedagang Kaki Lima (PKL) dan solusi untuk memenahi dan menata Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk berjualan tidak tampak sama sekali, Pemerintah lepas tangan dengan keadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Raya, dengan demikian banyak efek-efek negatif yang diterima oleh masyarakat yang berkunjung kepasar. Dan ada juga konflik antara pedagang dengan pedangan dengan masalah perebutan lokasi berdagang, dan parahnya lagi terdapat aksi perlawanan antara pedagang dengan petugas ketika ada pergusuran.

Tidak sesuai dengan Perda dalam pengelolaan pasar yang mana Pedagang Kaki Lima (PKL) berhak menempati ruang tempat usaha yang telah disediakan, tetapi penulis menemukan di lapangan keberadaan pasar yang semrawut karena PKL yang berjualan di ruang publik. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti persoalan ini dalam sebuah skripsi dengan judul **Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Pasar Raya Kota Solok.**

B. Identifikasi, Pembatasan, Perumusan Masalah Dan Hipotesis Penelitian

1. Identifikasi Masalah

- a. Masih adanya Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan sepanjang jalan dan gang dalam pasar yang mengakibatkan kemacetan dan terganggunya masyarakat yang berjalan kaki.
- b. Tidak efektifnya kebijakan pemerintah dalam menangani masalah Pedagang Kaki Lima (PKL).
- c. Belum ditemukan solusi dan kesepakatan antara pemerintah dan PKL dalam menangani masalah seperti: konflik antara pedagang dengan pedagang sendiri, konflik antara pedagang dengan petugas, lokasi tempat berjualan, kebersihan, lingkungan dan kenyamanan.

2. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis mempunyai batasan masalah adapun batasan yang diteliti adalah mengenai implementasi kebijakan Pemerintah dalam penertiban PKL di Pasar Raya Kota Solok, kendala-kendala yang di hadapi oleh Pemerintah dalam penertiban PKL di Pasar Raya Kota Solok, dan upaya-upaya apa yang harus di lakukan oleh Pemerintah dalam Penertiban PKL di Pasar Raya Kota Solok.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan dari identifikasi dan batasan masalah diatas, maka rumusan masalah yang penulis uraikan dalam penelitian ini adalah :

- a. Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Upaya Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Raya Kota Solok.
- b. Kendala-kendala Kebijakan Pemerintah dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Raya Kota Solok.
- c. Upaya Pendukung Kebijakan Pemerintah dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Raya Kota Solok.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

- a. Untuk mengetahui implementasi kebijakan Pemerintah dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Raya Kota Solok.

- b. Untuk mendefinisikan kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Raya Kota Solok.
- c. Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan Pemerintah dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Raya Kota Sook.

D. Manfaat Penelitian

- 1. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, dalam meningkatkan Kebijakan Pemerintah Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) agar kedepannya lebih efektif dan efisien.
- 2. Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah kepustakaan di bidang ilmu Kebijakan Publik yang terutama sekali yang berkaitan dengan masalah Kebijakan Pemerintah Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) dan diharapkan dapat menjadi bahan tambahan informasi bagi peneliti lain yang membutuhkan informasi mengenai Implementasi Kebijakan Pedagang Kaki Lima (PKL).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan temuan dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan dalam penertiban PKL yang dilakukan pemerintah Kota Solok belum optimal dilaksanakan. Hal ini disebabkan karena pelaksanaanya bersifat hanya perencanaan saja dan tidak berdampak secara signifikan. Penertiban PKL selama ini terkesan kepada *follow up* (penawasan) ketimbang sosialisasi, penyuluhan dan tindakan persuasif.
2. Penertiban PKL yang dilakukan pemerintah Kota Solok belum efektif dilaksanakan, karena dipengaruhi oleh beberapa kendala-kendala antara lain: 1) peran Satpol PP dalam melakukan penertiban juga mempunyai kendala yaitu kerjasama dan koordinasi yang dipengaruhi kurang adanya komunikasi yang baik dan masih lemah, sumber daya yang terbatas dipengaruhi karena anggota yang terjun kelapangan hanya 15-20 orang masih belum memadai dalam melakukan penertiban terhadap PKL. 2) peran Dinas Pengelolaan Pasar yang seharusnya memelihara ketertiban dan keamanan. 3) PKL yang sering melakukan pelanggaran Perda semakin hari semakin bertambah. 4) peran masyarakat sangat mendukung kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah dalam menertibkan PKL.

3. Upaya Pemerintah Kota Solok belum mendapatkan dukungan dari PKL, walaupun penertiban berlangsung. Dimana tidak memperoleh dukungan dari pihak terkait lainnya dan pedagang. Dimana Dinas Perhubungan tidak bersedia berkerjasama dengan Dinas Pengelolaan Pasar dalam memberikan lahan kepada PKL. Selain itu daerah toritorial yang disediakan pemerintah bagi PKL selalu ditolak dan malangnya aspirasi PKL cenderung diabaikan oleh pemerintah daerah.

B. SARAN

Adapun saran yang dapat diberikan untuk kelancaran dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Raya Kota Solok adalah sebagai berikut:

1. Agar kebijakan dalam penertiban PKL ini bejalan optimal seharusnya pemerintah Kota Solok lebih difokuskan pada mekanisme pre-entif, karena strategi ini dapat memberikan pemahaman kepada PKL melalui sosialisasi dan penyuluhan secara intensif kepada PKL. Selain itu penertiban sebaiknya juga lebih memperlihatkan pada tindakan persuasif (tindakan perorangan). Karena persuasif dapat menampung aspirasi PKL, sehingga kebijakan penertiban lebih terkesan dalam *Bottom up* ketimbang *Top down*.
2. Supaya kebijakan dalam penertiban PKL ini efisien dilakukan, sebaiknya pemerintah Kota Solok memberikan semacam pembelajaran dan diperlukannya edukasi. Dimana Ini diberikan bukan hanya kepada PKL

saja, melainkan juga kepada Satpol PP dan masyarakat. Karena tidak mungkin PKL mampu bertahan berdagang di areal terlarang kalau bukan didukung oleh masyarakat yang tetap membeli kepada mereka. Namun demikian seharusnya pemerintah juga memberikan sanksi bagi masyarakat. Disamping itu untuk terwujudnya kebijakan yang efisien dalam penertiban PKL, sebaiknya pemerintah pertama, lebih merealisasikan anggaran yang cukup dan disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh aparaturnya penegak Perda, guna untuk meluncurkan pelaksanaannya. Kedua, sebaiknya pemerintah menambah sumber daya aparaturnya agar penertiban dapat dilakukan lebih efisien.

3. Agar pemerintah Kota Solok memperoleh dukungan dalam penertiban, sebaiknya pemerintah lebih memperhatikan PKL. Seperti dalam bentuk pemberdayaan PKL, dimana hanya terkesan memberikan bantuan modal saja. Tetapi tempat yang layak tidak diberikan, sehingga PKL mencari alternatif tempat sendiri untuk berjualan. Pemerintah tidak bisa mengusir PKL begitu saja tanpa adanya alternatif yang tepat dan memberikan lahan pengganti untuk mereka. Jadi sebaiknya pemerintah mempertimbangkan masukan-masukan dari pedagang dan menyediakan lokasi/tempat yang disepakati oleh PKL, tetapi tidak mengganggu dan tidak merugikan pihak-pihak lain. Sangat diharapkan kebijaksanaan pemerintah kota Solok untuk mempertimbangkan hal tersebut untuk lebih memberdayakan PKL.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abidin, Said Zainal. 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Afan Gaffar. 2003. *Otonomi Daerah dalam Negara Persatuan*. Yogyakarta: Presindo.
- Agus Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta
- Budi Winarno. 2007. *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik (Berbasis Dynamic Policy Analysis)*. Yogyakarta: Gava Media.
- Edi Suharto. 2008. *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Erwan Agus. P, dkk. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Lexy Moleong. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Leo Agustino. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Miles, dan Huberman, A.M. 2009. *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: UI Pers.
- Mustopad. 2003. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Balaitung dan CO.
- Riant Nugroho. 2004. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Media Komputindo.
- . 2008. *Public Policy*. Jakarta: PT. Media Komputindo.
- Solichin Abdul Wahab. 1991. *Analisis kebijaksanaan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta. Bumi Aksara.
- . 2012. *Analisis Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara.